

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 104 TAHUN 2018

TENTANG

**PENETAPAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SELAKU PEJABAT PENGGUNA BARANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Barang Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU : Menetapkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Barang Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bersifat ex-officio.
- KETIGA : Dalam hal terjadi pergantian jabatan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), setelah serah terima jabatan, maka Pejabat Kepala SKPD yang baru langsung menjabat sebagai Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Dalam hal Pejabat selaku Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhalangan sementara/tetap, maka tugas dan kewenangan Pengguna Barang dapat dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Harian/Pelaksana Tugas melalui Surat Penunjukan Pelaksana Harian/Pelaksana Tugas.
- KELIMA : Penunjukan Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dicabut dan berakhir apabila :
- a. Terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/atau
 - b. Tidak teralokasi anggaran untuk program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.
- KEENAM : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pejabat Pengguna Barang yang penunjukannya berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh administrasi dan pelaporan keuangan.

KETUJUH : Tugas dan tanggung jawab Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagai berikut :


- a. mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
- b. mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
- e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- g. menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang;
- h. mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
- i. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- j. menyusun dan menyampikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

KEDELAPAN : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dalam pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Penandatanganan kontrak atas proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran sesuai dengan tugas fungsi SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
15. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
16. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/Kepala Suku Dinas/ Kepala Suku Badan/Kepala UPT Provinsi DKI Jakarta
18. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
19. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
20. Direktur RSU Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
21. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
22. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
23. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

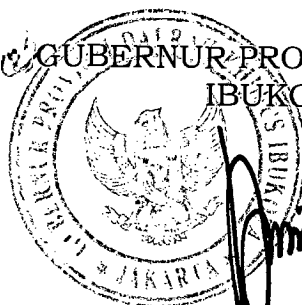
Nomor 104 TAHUN 2018
Tanggal 18 Januari 2018

PENETAPAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SELAKU PEJABAT PENGGUNA BARANG
TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Pengguna Barang
1	2
1.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2.	Inspektur
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
5.	Kepala Badan Pengelola Aset Daerah
6.	Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
7.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
8.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
10.	Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
11.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
12.	Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
13.	Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
14.	Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
15.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan
16.	Kepala Dinas Perindustrian dan Energi
17.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
18.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
19.	Kepala Dinas Perhubungan
20.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
21.	Kepala Dinas Bina Marga
22.	Kepala Dinas Sumber Daya Air
23.	Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
24.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
25.	Kepala Dinas Sosial
26.	Kepala Dinas Pendidikan
27.	Kepala Dinas Kesehatan
28.	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga
29.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
30.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
31.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Pengguna Barang
1	2
32.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
33.	Kepala Dinas Kehutanan
34.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
35.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
36.	Walikota Jakarta Pusat
37.	Walikota Jakarta Utara
38.	Walikota Jakarta Barat
39.	Walikota Jakarta Selatan
40.	Walikota Jakarta Timur
41.	Bupati Kepulauan Seribu
42.	Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anes Baswedan
ANES BASWEDAN